

Evaluasi Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pembangunan Infrastruktur di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri)

Yosa Anggraeni

15040674106 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email : Yosaanggraeni@mhs.unesa.ac.id

Tjijik Rahaju, S.Sos., M.Si

197104281999032001 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email : tjijikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Program ini memiliki payung hukum yaitu Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bidang infrastruktur, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kegiatan pada bidang infrastruktur di Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri khususnya di RT 037 RW 011 pada tahun 2016 dan 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto sudah sesuai dengan tujuan program itu sendiri. Meskipun dalam pelaksanaan terdapat kendala, namun masih bisa diatasi. Sehingga pada tahun 2018 dapat masuk dalam nominasi Prodama Award. Saran yang dapat diberikan yaitu jika kegiatan infrastruktur dilaksanakan lagi, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan berdampak ataupun meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Serta diharapkan RT tetap memperhatikan semua usulan warga namun tetap mempertimbangkan mana saja usulan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir diharapkan warga tetap ikut mengawasi jalannya kegiatan karena bagaimanapun kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan berdasarkan dari usulan dari mereka dan untuk kepentingan warga atau mereka sendiri.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

The Community Empowerment Facilitation Program is a program from the City Government of Kediri that is used to carry out community development activities at the village level based in the RT area as an effort to realize the ability and independence of the community in infrastructure development, community economic improvement, and social society. This program has a legal umbrella namely Kediri Mayor Regulation Number 22 Year 2017 Regarding the Fifth Amendment to Kediri Mayor Regulation Number 40 Year 2014 Regarding Guidelines for Implementing Community Empowerment Facilitation Programs. This research focuses on the infrastructure sector, with the aim to find out and analyze how the implementation of activities in the infrastructure sector in Mojoroto Village, Mojoroto District, Kediri City, especially in RT 037 RW 011 in 2016 and 2017. This study uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews and documentation. The analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of research conducted that the implementation of infrastructure activities carried out in RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto is in accordance with the objectives of the program itself. Although there are obstacles in the implementation, they can still be overcome. So that in 2018 can be included in the Prodama Award nomination. Suggestions that can be given are if infrastructure activities are carried out again, it is hoped that the development carried out will have an impact or improve the economic welfare of the community. And it is expected that the RT will continue to pay attention to all the proposals of citizens but still consider which proposals are in accordance with the needs. And lastly, it is hoped that residents will continue to supervise the activities, because after all the infrastructure activities are carried out based on their proposals and in the interests of the residents or themselves.

Keywords: Evaluation, Policy, Community Empowerment Facilitation Program

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan amanat konstitusi (UUD 1945). Ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perencanaan pembangunan daerah dalam konteks pembangunan nasional memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi pencapaian tujuan

tujuan pembangunan nasional. Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola daerahnya secara mandiri, Iskandar dalam (journal.unesa.ac.id). Untuk mewujudkan hal tersebut yang dapat pemerintah lakukan yaitu dengan melakukan pembangunan nasional, yang meliputi semua aspek kehidupan baik sosial budaya, ekonomi, politik maupun pertahanan keamanan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud dari pembangunan. Menurut Suharto (2005:59-60) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sedangkan menurut Sunartiningsih (2004:50) pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 5 ayat (2) pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Contoh dari program pemberdayaan yaitu Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). PRODAMAS merupakan program dari pemerintah Kota Kediri. Yangmana Kota Kediri merupakan kota terbesar nomor 3 (tiga) di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 292.768 orang/jiwa sampai dengan tahun 2018. Program ini sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Walikota Kediri yaitu “Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Tanpa Korupsi”. Menariknya dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat berpartisipasi dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Sehingga masyarakat lebih mandiri, lebih tahu apa yang mereka butuhkan melalui program ini.

Program ini diatur oleh Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. Program ini dikembangkan dan dirancang sebagai program unggulan Pemerintah Kota Kediri yang ditujukan untuk menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Khususnya, ditingkat kelurahan dengan berbasiskan pada wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan (www.kedirikota.go.id).

Adapun tujuan dari Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat menurut Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Prodamas yaitu; menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya, memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya, meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, dan meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Kelurahan Mojoroto merupakan salah satu kelurahan yang mengimplementasikan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). Kelurahan ini memiliki 13 RW dengan 53 RT. Setiap RT di desa tersebut rutin mengajukan atau mengusulkan bantuan ataupun kegiatan untuk PRODAMAS. Dengan beberapa tahap pencairan dana yang berbeda setiap RTnya. Adapun secara umum program ini telah diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti; bidang infrastruktur diwujudkan dalam pembenahan saluran air dan pafingisasi yang dikerjakan oleh warga, bidang ekonomi diwujudkan seperti pelatihan ketrampilan yang diberikan kepada Ibu-ibu setempat seperti menjahit, bidang sosial diwujudkan dalam pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada masing-masing kepala keluarga dan bantuan berupa alat tulis pada warga yang masih bersekolah.

RT 037 RW 011 merupakan salah satu RT di Kelurahan Mojoroto yang masuk nominasi PRODAMAS Award 2018 dalam bidang Infrastruktur. Infrastruktur yang dibuat yaitu RT dan perbaikan saluran air. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari sebuah kendala seperti kurang komunikatifnya warga karena mempunyai kesibukan masing-masing, perbedaan pendapat pada saat rembug warga, kegiatan yang sama dilakukan dua kali, serta kurangnya tenaga pekerja.

Penelitian evaluasi ini penting dilakukan terhadap Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ini untuk mengetahui apakah suatu kebijakan sudah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan atau belum dalam suatu kebijakan sehingga dapat dikatakan berhasil, serta dapat membantu memberikan masukan untuk program fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang akan datang. Karena bagaimanapun program ini salah satu program unggulan di Kota Kediri yangmana program ini dapat menjangkau wilayah RT, serta mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan selalu melibatkan masyarakat. Maka untuk mengevaluasi program ini peneliti menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn yang terbagi menjadi enam fokus yaitu, efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Sehingga judul penelitian ini yaitu “Evaluasi Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pembangunan Infrastruktur di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri)”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah pada evaluasi Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) khususnya tentang kegiatan pembangunan infrastruktur RT 037 RW 011 dengan menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn (2003:429) yang terdiri dari efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2013:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Pada kriteria efektivitas, suatu kebijakan ditentukan dari bagaimana hasil atau tujuan yang diinginkan dapat tercapai atau tidak. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif jika hasil kebijakan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil dari pelaksanaan kebijakan tidak mampu untuk mencapai tujuan maka dapat disimpulkan terdapat masalah yang muncul pada pelaksanaannya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri merupakan salah satu bentuk bidang kegiatan yang terdapat di Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dari program ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat, bahwa tujuannya yaitu:

1) Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya. Pada tujuan yang pertama, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengusulkan apa saja rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui forum rembug warga. Melalui forum rembug warga ini masyarakat bebas untuk menyampaikan pendapatnya terkait kegiatan yang akan diusulkan. Warga RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto pada saat rembug warga, melakukan rembug warga dengan baik meskipun ada beberapa perbedaan pendapat antar warga namun dapat teratasi dan ada beberapa warga yang tidak dapat hadir. Serta masyarakat diajak ikut dalam pelaksanaan dalam kegiatan yang telah diusulkan, pada tahap pelaksanaan warga tidak

dapat ikut karena memiliki pekerjaan masing-masing sehingga solusinya harus mencari pekerja dari luar. Meskipun demikian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan selain bentuk dari partisipasi dalam hal pelaksanaan, masyarakat masih dapat melakukan pengawasan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan meskipun tidak setiap hari.

- 2) Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya. Kebutuhan masyarakat, dalam artian kebutuhan bersama (umum) dapat diwujudkan melalui program ini. Dalam program ini masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan, kritikan maupun masalah-masalah mereka melalui forum rembug warga. didalam sehingga kebutuhan apa saja yang mereka perlukan dapat tersampaikan tentunya dengan keputusan bersama. Sehingga terpenuhinya kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di RT 037 RW 011 telah dibangunnya balai pertemuan/RT yang dapat dimanfaatkan oleh warganya untuk kegiatan PKK, posyandu maupun kegiatan lainnya. Serta diperbaikinya saluran air, yang awalnya air tidak dapat meresap ke tanah, setelah dibenerin tidak terjadi genangan air pada saat hujan deras.
- 3) Meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT. Dalam program ini masyarakat diharapkan dapat terfasilitasi baik sarana maupun prasarana. Terfasilitasinya sarana dan prasarana masyarakat dapat membantu kegiatan serta mempermudah kegiatan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan khususnya tentang kegiatan infrastruktur sarana yang diusulkan di RT 037 RW 011 yaitu berupa kursi, meja, tikar, maupun lampu penerangan jalan. Untuk prasaran diwujudkan dengan pembuatan balai pertemuan/RT serta perbaikan saluran air.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Kediri. Secara fisik khususnya kegiatan infrastruktur peneliti belum mendapatkan hasil yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan kegiatan ini bisa memberikan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat khususnya RT 037 RW 011. Tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pekerja yang melaksanakan kegiatan infrastruktur yaitu pembuatan balai RT dan perbaikan saluran air diakui bahwa perekonomian mereka terbantu.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan program ini terdiri dari berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang sosial ekonomi. Dalam kegiatan sosial

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun fokus peneliti pada kegiatan bidang infrastruktur, namun pada saat penelitian peneliti mendapatkan data tambahan pada saat wawancara yaitu di RT 037 RW 011 kegiatan sosial diwujudkan seperti bantuan sosial maupun pengajian yang dilaksanakan di balai RT yang sudah dibangun.

- 6) Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini masyarakat diajak untuk turut berperan dalam mengatasi kebutuhan bersama (umum) serta bagaimana cara mengatasinya dalam arti bagaimana cara mengusulkan kegiatannya hingga pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa warga RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto melakukan musyawarah melalui rembug warga, di dalam rembug warga mereka dapat menyampaikan apa saja yang ingin diusulkan.

2. Efisien

Efisiensi dapat dilihat dari seberapa besar penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jika semakin sedikit sumber daya yang digunakan maka semakin efisien pelaksanaan kegiatan. Sumber daya tersebut antara lain, sumber daya manusia, sumber daya biaya dan sumber daya waktu serta sumber daya fasilitas.

Hasil evaluasi pada kriteria efisiensi sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri menunjukkan bahwa di setiap RT pada saat melaksanakan kegiatan dibantu oleh satu Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan kegiatan bersama masyarakat, dan satu pendamping yang bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis maupun saran alternatif. Kemudian ada RT yang mengendalikan dan memantau kegiatan, serta memberikan saran masukan. Dan tentunya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Di setiap kegiatan yang dilaksanakan diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Serta perlunya mengupayakan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga semua bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan adanya petugas dalam pelaksanaan kegiatan ini kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan masyarakat merasa sangat terbantu.

Sumber Daya Waktu yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di RT 037 RW 011 tentang pembuatan balai pertemuan/RT dan

perbaikan saluran air memerlukan waktu yang tidak sedikit mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di RT 037 RW 011 telah sesuai dengan rencana. Pada tahap persiapan dilakukannya rembug warga hingga pembelian barang dilakukan kurang lebih selama tiga bulan yaitu bulan maret, april, dan mei. Pelaksanaan mengikuti jadwal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan hasil kegiatan. Namun memang dalam pelaksanaan pembuatan balai RT ini dilakukan pada dua tahap. Tahap pertama dilakukan pengajuan pada Tahun 2015 terus pelaksanaan Tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama yaitu Tahun 2016 di ajukan lagi untuk balai pertemuan dan perbaikan saluran air sehingga pada Tahun 2017 sudah mulai pengerjaan lagi.

Efisiensi sumber daya biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto terlihat pada saat mereka melakukan rembug warga. ketika melakukan rembug warga mereka membutuhkan laptop untuk membuat proposal untuk kegiatan yang akan dilaksanakan namun mereka tidak membelinya melainkan memanfaatkan warga yang memiliki laptop tersebut. Sehingga dengan dana yang dimiliki sebesar 50 juta, mereka dapat memanfaatkan dengan sebaiknya untuk keperluan kegiatan pembangunan infrastruktur di RT mereka, mulai dari untuk pembelian bahan bangunan hingga untuk membayar tenaga pekerja.

Kriteria efisiensi yang terakhir adalah efisiensi pada sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas merupakan sarana maupun prasarana penunjang yang diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Sumber daya fasilitas dari pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang diwujudkan dalam pembuatan balai pertemuan dan perbaikan saluran air adalah berupa sarana. Sarana tersebut berupa papan pengumuman yang dapat dimanfaatkan untuk menempel kegiatan apa saja yang sedang dilaksanakan di RT tersebut

3. Kecukupan

Pada kriteria kecukupan dapat dikatakan bahwa kecukupan berhubungan dengan efektivitas output yang dihasilkan dapat mengatasi masalah yang selama ini ada. Sehingga kebijakan dikatakan memenuhi kriteria kecukupan apabila output yang dihasilkan telah mampu untuk mengatasi masalah yang selama ini ada sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan. Kebijakan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat ini hadir sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Kediri yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan

bidang infrastruktur yang dilaksanakan di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojo, kegiatan ini hadir karena belum adanya fasilitas yang memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan bersama warga lainnya, seperti pada saat kegiatan posyandu atau pengajian mereka harus menyewa tenda dalam melakukan kegiatan, lokasi untuk mendirikan tenda juga menyita waktu, serta memperbanyak pengeluaran kegiatan, belum lagi jika turun hujan. Oleh karena itu dibuatkannya balai pertemuan/RT untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat serta diperbaikinya saluran air untuk mencegah terjadinya banjir. Meskipun dalam pelaksanaan pembuatan balai pertemuan dilakukan dua tahap, serta adanya kesulitan menyatukan pendapat warga, maupun kurang komunikatifnya warga serta kurangnya tenaga pekerja namun dengan kerja keras serta dukungan dari masyarakat. Kegiatan pada pembangunan infrastruktur ini masuk dalam nominasi Prodamas Award pada Tahun 2018, dengan memenuhi kriteria penilaian bidang infrastruktur.

4. Pemerataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Pemerataan dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari terpenuhinya fasilitas warga apakah sekarang sudah merata atau masih sama seperti sebelumnya. Serta siapa saja yang dapat merasakan fasilitas tersebut karena sasaran dari program ini yaitu seluruh Rukun Tetangga dan masyarakat Kota Kediri. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan warga di RT 037 RW 011 menjadi lebih mudah, seperti pada saat pelaksanaan kegiatan RT mereka sudah mempunyai tempat kegiatan yaitu balai. Pelaksanaan kegiatannya pada pembangunan infrastruktur pun berdasarkan RAB yang sudah dibuat, dengan dana yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik ini diartikan sebagai tanggapan dari suatu kegiatan. Kegiatan ataupun kebijakan dapat dilihat keberhasilannya melalui bagaimana respon masyarakat yang menanggapi atau memprediksi pelaksanaan kegiatan sebelum maupun sesudah dilakukannya kegiatan tersebut.

Responsivitas pada pembangunan infrastruktur di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojo ditunjukkan dari bagaimana respon mereka apakah mendukung atau menolak. Ada warga yang mengatakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan bagus namun dalam hal pelaksanaan mereka tidak dapat ikut berpartisipasi karena kesibukan masing-masing serta ada lansia yang tidak mungkin turut dalam pelaksanaan kegiatan. Namun karena sudah ada petugas yang membantu sehingga

selesai juga kegiatan yang diusulkan. Sedangkan tanggapan warga lainnya yaitu mereka mengerti bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk keperluan bersama meskipun mereka tidak ikut dalam pelaksanaan mereka tetap ikut senang, dan merasa senang dengan dibuatkannya balai pertemuan dan perbaikan saluran air tersebut.

6. Ketepatan

Dunn menyatakan ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Jika manfaat kegiatan pembangunan infrastruktur yang merupakan wujud dari Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat diperoleh sangat baik bagi warga RT 037 RW 011 maka dapat dipastikan kebijakan yang dibuat pemerintah tentang Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat ini telah sangat tepat dilakukan. Ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur RT 037 RW 011 yang dilaksanakan dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil kegiatan akan menunjukkan bagaimana dampak dan manfaat adanya kegiatan yang diusulkan. Hasil yang diperoleh yaitu telah dibangunnya balai pertemuan/RT dan dilakukannya perbaikan saluran air di wilayah RT 037 RW 011 Kelurahan Mojo Kecamatan Mojo Kota Kediri. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa dampak adanya kegiatan yang diusulkan yaitu terfasilitasinya kebutuhan warga di RT tersebut, mempermudah warga dalam melakukan kegiatan sosial bersama seperti kegiatan posyandu maupun arisan yang dapat dilakukan di balai tersebut, dengan tidak perlu menyewa tenda ataupun khawatir banjir. Serta dampak dari segi lain pun dirasakan oleh para pekerja yang mengerjakan kegiatan tersebut, sedikit banyak menambah penghasilan mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun bukan warga RT 037 RW 011 yang merasakan dampak dari segi ekonomi. Mereka sudah cukup senang dengan terfasilitasinya balai pertemuan/RT dan diperbaikinya saluran air tersebut. Dengan dilaksanakan kegiatan ini yaitu peran warga jadi meningkat serta terdorongnya keberdayaan masyarakat itu sendiri dalam pembangunan, sesuai dengan tujuan dari Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat menurut hasil evaluasi difokuskan pada kegiatan pembangunan bidang infrastruktur di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang dapat disimpulkan dari teori William N. Dunn sebagai berikut; Pada kriteria efektivitas kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil yang dapat dilihat dari sesuai kegiatan yang dibuat dengan tujuan program PRODAMAS itu sendiri. Untuk efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia, waktu, biaya hingga fasilitas dinilai sudah efisien, dimana antara warga dengan petugas bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan. Pada kriteria kecukupan, pembangunan infrastruktur di RT 037 RW 011 telah mengatasi masalah yang selama ini ada di RT tersebut. Namun pembangunan kegiatan infrastruktur di RT tersebut tidak terlepas dari masalah namun dengan kerja keras serta dukungan dari masyarakat kegiatan pada pembangunan infrastruktur ini masuk dalam nominasi Prodamas Award pada Tahun 2018. Sementara untuk kriteria pemerataan dapat dirasakan oleh seluruh warga RT tersebut tanpa terkecuali, karena memang sasaran dari program ini yaitu seluruh masyarakat. Kemudian untuk responsivitas warga senang dengan adanya program tersebut dan menyambut dengan baik program tersebut dan tentunya mereka senang dengan dibuatkannya balai pertemuan/RT sehingga mempermudah kegiatan mereka serta tidak perlu khawatir jika hujan deras karena air suah dapat masuk dengan baik pada saluran air sehingga tidak terjadi banjir. kriteria ketepatan, ketepatan kegiatan yang dilaksanakan di RT tersebut dinilai sudah tepat, karena terfasilitasinya kegiatan mereka dengan adanya balai pertemuan dan perbaikan saluran air. Serta dari (pekerja) mendapat tambahan pemasukan selama mengerjakan kegiatan karena warga di RT 037 RW 011 tidak dapat ikut dalam pelaksanaan. Serta dari segi sosial mereka menjadi lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan atau kegiatan sosial lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran terkait evaluasi Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang berfokus penelitian pada kegiatan pembangunan bidang infrastruktur di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yaitu;

- 1) Kedepannya jika kegiatan infrastruktur dilaksanakan lagi, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan berdampak ataupun meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat. Seperti dibuatkan tempat khusus atau ruko untuk warga yang tidak bekerja untuk berjualan.

- 2) Diharapkan RT tetap memperhatikan semua usulan warga namun tetap mempertimbangkan mana saja usulan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan sebaiknya tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mengingat dana yang diberikan cukup banyak dibandingkan dengan bidang kegiatan yang lainnya. Sehingga tidak perlu dilakukan pembangunan dengan kegiatan yang sama.
- 4) Mayoritas warga di RT tersebut memang bekerja di kantor sehingga untuk pelaksanaan kegiatan tidak dapat ikut, sebaiknya warga tetap mengawasi. Karena bagaimanapun kegiatan infratraktur tersebut dilaksanakan berdasarkan dari usulan dari mereka dan untuk kepentingan warga atau mereka sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Eva Hanya Fanida, S.AP., M.AP., selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara.
2. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP, selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.
3. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.
4. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Iskandar, Dina dan Sumartono, Tjahjanulin Domai.2016. "Evaluasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo".Journal Of Public Sector Innovation. Vol.1: Hal.17-22
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2007 Tentang Perencanaan
Pembangunan Des

Sugiyono. 2013. Statistika untuk Penelitian. Jakarta:
IKAPI

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat
Memberdayakan Rakyat. Bandung:
Refika Aditama

Sunartiningsih, Agnes. 2004. *Pemberdayaan
Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*.
Yogyakarta: Aditya Media

www.kedirikota.go.id (diakses pada 28 Pebruari
2019)